

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan yaitu situasi dimana seseorang, sebuah keluarga, komunitas atau bahkan negara mengalami keterbatasan yang mereka sandang sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, keadilan menjadi terancam, hilangnya generasi serta masa depan bangsa dan negara menjadi suram. Kemiskinan ini dikaitkan dengan ketidaknyamanan dalam hidup, dimana hal ini menunjukkan bahwa orang yang miskin hampir selalu dan sering tidak nyaman dalam hidupnya. Mereka selalu mnejadi kaum tersingkir dalam segala bidang karena mereka tidak bisa menyamakan keadaan mereka dengan keadaan masyarakat sekitar.¹

Menurut Nurkse², lingkaran kemiskinan merupakan suatu rentetan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membuat suatu kondisi dimana suatu negara negara akan tetap miskin dan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan ataupun

¹ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hal. 80

² Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak", *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vo. 6 No. 1 April 2016

non pangan. Kemiskinan ini berkaitan dengan kekurangan materi ataupun rendahnya penghasilan seorang individu. Sedangkan dinas sosial mengartikan bahwa seseorang yang miskin merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka serta mereka yang memiliki pekerjaan namun kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan hidup seseorang yang mengarahkan pada kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak.

2. Empat Belas Kriteria Miskin Menurut Standar BPS

Dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS memutuskan kriteria rumah tangga miskin yaitu:³

- a. Tempat tinggal dengan luas lantai bangunan kurang dari 8 m² per orang.
- b. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster.
- d. Fasilitas buang air besar bersama-sama dengan orang lain atau tidak memiliki fasilitas pribadi.

³ Edi Does, "Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal of Economic and Economic Education*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014

- e. Tidak menggunakan listrik dalam penerangan rumah tangga
- f. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, dan air hujan
- g. Dalam memasak sehari-hari menggunakan bahan bakar seperti kayu bakar, arang, minyak tanah
- h. Mengonsumsi daging, susu, atau ayam hanya satu kali dalam seminggu
- i. Dalam setahun hanya membeli satu stel pakaian baru
- j. Dalam sehari hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali
- k. Tidak mampu membayar biaya pengobatan Puskesmas/Poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600 ribu per bulan
- m. Kepala rumah tangga memiliki pendidikan tertinggi: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500 ribu.

Dengan adanya ukuran kemiskinan tersebut maka memudahkan dalam menentukan batas minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran.

3. Indikator Kemiskinan

Terdapat 3 indikator kemiskinan yang digunakan dalam pendekatan kebutuhan dasar, yaitu:⁴

- a. *Headcount Index*, merupakan indeks yang digunakan mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Angka indeks yang kecil menunjukkan bahwa semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sebaliknya apabila angka indeks besar maka menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tinggi.
- b. *Poverty Gap Index*, yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain kehidupan penduduk makin semakin terpuruk.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity Index*, untuk memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

⁴ Cica Sartika et. al. "Studi Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, April 2016

4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dari sisi ekonomi, menurut Kuncoro terdapat tiga penyebabnya, yaitu:⁵

- a. Secara mikro, kemiskinan timbul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan produktivitasnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bersumber dari rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan timbul akibat perbedaan akses dalam modal.

5. Jenis - jenis Kemiskinan

Chambers berpendapat ada empat jenis-jenis kemiskinan, yaitu:⁶

- a. Kemiskinan absolut, merupakan kondisi pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan pendapatan di bawah garis kemiskinan serta belum tercukupi kebutuhan dasar hidupnya yakni makanan, pakaian serta rumah.
- b. Kemiskinan relatif, merupakan situasi dimana seseorang telah terpenuhi kebutuhan dasar dalam hidup, akan tetapi apabila

⁵ Cica Sartika et. al., “*Studi Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat...* hal. 109

⁶ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin...* hal. 3-4

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar masih lebih rendah.

Dalam hal ini, apabila tingkat hidup masyarakat berubah, maka garis kemiskinan akan mengalami perubahan.

- c. Kemiskinan kultural, merupakan seseorang dengan sifat pemalas tidak ingin berusaha merubah tingkat hidupnya sekalipun mendapat bantuan dari orang lain.
- d. Kemiskinan struktural, merupakan kondisi yang diakibatkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap memicu suburnya kemiskinan.

Berbagai macam ukuran kemiskinan tersebut dapat digunakan sebagai patokan dalam mengkategorikan masyarakat miskin.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Arti Pertumbuhan Ekonomi

Apabila dalam masyarakat produksi barang dan jasa meningkat serta meningkatnya kemakmuran masyarakat, maka akan terjadi perkembangan kegiatan dalam perekonomian. Inilah yang disebut juga dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya sangat dekat dengan kehidupan warga.

Untuk menilai kemajuan perekonomian daerah maupun negara maka para ahli ekonomi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikatornya. Oleh karena itu, investasi dalam sektor infrastruktur dan produksi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Pembangunan infrastruktur memudahkan akses pengiriman barang dan jasa sehingga produktivitas hendak meningkat. Apabila produktivitas meningkat maka terjadi pula peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB).⁷

Pada awal mula pembangunan akan terlihat adanya pertumbuhan yang tinggi dengan diikuti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang tinggi pula. Menurut Kuznets, situasi tersebut hendak berlangsung sampai pada titik kritis tertentu, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.⁸

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli menandang faktor produksi sebagai energi utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Jatuh atau banggunya laju pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut, diantaranya :⁹

1) Sumber Alam

Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kesukaran sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Di negara kurang berkembang, sumber alam sering terabai, yang mana dalam pemanfaatannya kurang ataupun salah. Inilah salah satu pemicu

⁷ Sirilius Seran, *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublisher, 2016), hlm. 114

⁸ Primandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 16 No. 1 Juni 2018

⁹ Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan; Pembagian Ekonomi Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2014), hal. 56-58

kelambatan itu. Tersedianya sumber alam saja belum lengkap bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan pemanfaatan yang tepat.

2) Akumulasi Modal

Kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal. Di satu pihak ia mencerminkan permintaan efektif dan di pihak lain ia mewujudkan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal membuat kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal digunakan untuk melengkapi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah pemanfaatan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang dibutuhkan bagi kemajuan ekonomi.

3) Organisasi

Salah satu bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi yaitu organisasi. Para wiraswastawan hadir sebagai pembentuk dan mengambil risiko diantara ketidakpastian dalam pertumbuhan ekonomi modern. Myrdal berpendapat, negara – negara Asia kekurangan wiraswastawan bukan karena kekurangan modal atau bahan mentah, tetapi karena mereka kekurangan orang yang memiliki visi tentang pentingnya kewiraswastaan seperti itu. Tak heran mengapa Jepang meskipun kurang sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan termasuk kelompok negara yang maju.

4) Kemajuan Teknologi

Faktor yang paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu perubahan teknologi. Perubahan pada teknologi akan meningkatkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dan spesialisasi menumbuhkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat menuju ke arah ekonomi produksi skala besar yang kemudian dapat membantu perkembangan industri. Adam Smith mengutamakan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja mewujudkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Jika skala produksi luas, spesialisasi, dan pembagian kerja akan meluas pula. Akibatnya jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat.

3. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur kemajuan sebuah perekonomian dibutuhkan perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu memakai data dari PDRB.¹⁰ Produk Domestik Regional Bruto digunakan untuk melihat jumlah barang serta jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dalam suatu perekonomian.

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau perkotaan dapat dilihat dari penyajian PDRB. Cara penyajian PDRB menurut BPS, yaitu:

1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

¹⁰ A. Mahendra, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara", *JRAK*, Vol. 2 No. 2 September 2016, hlm. 131

Pengertian PDRB ADHK yakni jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mengukur kembali atau mendeskripsikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pengertian PDRB ADHB menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang mana maksud dari nilai tambah tersebut merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.¹¹

4. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Penambahan kemampuan riil dari setiap kegiatan usaha di wilayah tersebut baik dari barang ataupun jasa merupakan pengertian dari pertumbuhan ekonomi wilayah.¹²

Hoover mengutarakan bahwa perubahan pada permintaan (khususnya ekspor suatu wilayah) dan perubahan pada *supply* tenaga kerja regional serta

¹¹ Ady Soejoto dan Amelia Karisma, *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*, hal. 5

¹² Bagdja Muljarjadi, "*Pengembangan Ekonomi Wilayah, Pendekatan Analisis Tabel Input Output*", (Bandung: UNPAD PRESS, 201), hal. 41-42

faktor produksi lainnya (seperti kapital atau perubahan teknologi) merupakan penggerak utama dari pertumbuhan suatu wilayah.

Pertumbuhan yang terjadi dalam suatu wilayah bisa disebabkan oleh adanya dorongan dari sisi penawaran (*supply driven*), atau juga bisa disebabkan oleh adanya dorongan dari sisi permintaan (*demand driven*).

1) Teori Pertumbuhan dari Sisi Penawaran

Salah satu teori yang terpenting dari pertumbuhan sisi penawaran adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan ini menekankan pada pentingnya kapital, labor, dan faktor produksi lainnya dalam menciptakan tambahan output atau penghasilan. Beberapa asumsi penting yang harus dipegang dalam teori ini adalah :

- a. Adanya kontinuitas dari modal/ kapital (K) dan tenaga kerja/labor (L) untuk menghasilkan output.
- b. Faktor produksi akan bergerak (*factor mobility*) untuk terus merespons pasar yang pada akhirnya akan menciptakan harga faktor yang sama. Diasumsikan bahwa pada saat bertransaksi tidak ada biaya transportasi.
- c. Tidak ada skala ekonomi dan agglomerasi.
- d. Seperti asumsi yang kedua, bahwa sumberdaya bersifat *mobile*, *homogen*, dan *divisible*.
- e. Informasi dapat diperoleh dengan bebas tanpa biaya (asumsi pasar persaingan sempurna).

Secara umum teori ini dimulai dari sebuah fungsi produksi regional (fungsi yang menghubungkan antara besarnya input yang digunakan dalam proses produksi dengan jumlah output yang akan dihasilkan).

2) Teori Pertumbuhan dari Sisi Permintaan

Pada dasarnya teori pertumbuhan dari sisi permintaan pertama kali dikembangkan oleh Keynes yang lebih banyak membahas mengenai teori pertumbuhan pada tingkat nasional. Dalam perkembangannya, teori pertumbuhan ini kemudian berkembang juga ditingkat wilayah, dengan kata lain teori pertumbuhan wilayah dari Keynes yaitu adaptasi dari model multiplier pendapatan nasional yang dikenal dalam bidang makroekonomi. Seperti halnya pada penjelasan mengenai multiplier ditingkat nasional, proses pertumbuhan output atau multiplier di tingkat regional juga berasal dari adanya permintaan.

Dengan asumsi bahwa biaya input marginal dan biaya input rata-rata adalah konstan, serta tidak ada kendala kapasitas pada perekonomian suatu wilayah maka perubahan output (pertumbuhan ekonomi) akan terkait dengan perubahan pada permintaan agregat di tingkat region tersebut. Jika *Gross Regional Product* (PDRB) dari sisi pengeluaran bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r = \text{AD} \dots\dots$$

Di mana :

Y_r = Pendapatan wilayah

C_r = Konsumsi di tingkat wilayah

I_r = Investasi di tingkat wilayah

G_r = Pengeluaran pemerintah wilayah

X_r = Ekspor wilayah

M_r = Impor wilayah

AD = Permintaan agregat suatu wilayah

Kelima komponen diatas merupakan variabel-variabel sumber pertumbuhan ekonomi wilayah. Kenaikan pada C , I , G , dan $E-M$ (*nett export*) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.¹³

C. Rata-Rata Lama Sekolah

1. Pengertian Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya jumlah tahun standar dalam menamatkan pendidikan seseorang. Angka rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh seseorang dalam menempuk pendidikan formal. *Years of Schooling* ialah suatu angka yang menunjukkan lamanya pendidikan seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka Rata-rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS) ialah gabungan antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Akan tetapi jumlah tahun bersekolah Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak

¹³ Badja Muljarjadi, *Pembangunan Ekonomi Wilayah.....*, hal. 47-48

memperhatikan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.¹⁴

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional bertujuan membuat kemampuan peserta didik berkembang agar menjadi manusia beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵ Sehingga diperlukan usaha terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Teori Human Capital, teori ini memperkirakan bahwa investasi dalam dunia pendidikan dapat memperbaiki kualitas produktifitas masyarakat, kualitas masyarakat semakin baik apabila kualitas pendidikan baik, karena dengan pendidikan seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.¹⁶

Teori dari Kuznet, salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan di banyak negara adalah dengan pendidikan. Hal ini ditunjukkan apabila orang miskin mengharapkan pekerjaan dan penghasilan tinggi maka harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi pendidikan tinggi hanya dapat dicapai oleh orang kaya. Orang miskin tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Statistik Pendidikan...*, hal. 19

¹⁵ Miftaqh Nur dan Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *JUPE* Vol. 08 No. 01 Tahun 2020

¹⁶ *Ibid.*,

melanjutkan paada sekolah tinggi dan universitas. Sehingga dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kemiskinan.¹⁷

2. Ukuran Rata-Rata Lama Sekolah

Cerminan tingkat pendidikan secara keseluruhan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas. Pada Tahun 1990 UNDP telah memformulasikan angka rata-rata lama sekolah untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program wajib belajar nasional.¹⁸

Rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani merupakan definisi dari rata-rata lama sekolah. Angka tersebut menggambarkan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat dihitung menggunakan variabel partisipasi, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan ijazah terakhir yang dimiliki. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah.¹⁹ Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka pendidikan yang ditamatkan akan semakin lama/tinggi pula. Rumus yang digunakan adalah:

$$MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah Penduduk}$$

¹⁷ Utami dan Masjkuri, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin”, *Jurnal Ekonomi dan Binsis Airlangga* Vol 28 No. 2 Juni-November Tahun 2018

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Statistik Pendidikan...*, hal. 20

¹⁹ Abdul Hadi, “Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017”, *MediaTrend* Vol. 14 No. 2 Tahun 2019

Pemerintah telah merencanakan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Tujuan program ini untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduk usia 16-19 tahun atau peserta didik pada tingkat SMA, SMK, MA atau sederajat.

3. Teori *Human Capital*

Indikator tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Pendidikan ialah salah satu bentuk *human capital* yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 1964 Becker dalam bukunya "*human capital*" mengemukakan bahwa pendidikan dapat memiliki peranan penting dalam kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, ia menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh pendidikan tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan serta upah yang lebih layak dan menghindarkan seseorang dari kemiskinan. BPS menyampaikan bahwa salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. IPM menjadikan indeks pendidikan sebagai salah satu aspek untuk bahan evaluasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Metode baru cara untuk mengukur pendidikan masyarakat berdasarkan IPM ialah dengan melihat harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Mankiw dan Gregory²⁰ berpendapat bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi individu, apabila semakin tinggi pendidikan maka akan meningkat pula kesejahteraan suatu individu. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.

²⁰ Miftaah Nur dan Ady Soejoto, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama...*, hal. 18

D. Wakaf

1. Wakaf dan Ruang Lingkupnya

a. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*Waqafa*” yang berarti berhenti, menahan, diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam bahasa Arab kata al-Waaf memiliki pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Imam Abu Hanifah berpendapat wakaf berarti menahan suatu benda yang secara hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk hal-hal kebajikan. kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari wakif, bahkan wakif diperkenankan menarik kembali atau bahkan menjualnya. Sedangkan harta wakaf menjadi harta warisan apabila wakif telah wafat. Hal yang perlu diperhatikan dari wakaf ialah bagaimana menyumbangkan benda wakaf agar dalam kebijakannya memberikan manfaat.²¹

Sedangkan di dalam Komplikasi Hukum Islam, pada pasal 215 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf ialah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.²²

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian

²¹ Syamsuri et. al, “Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2020

²² Itang dan Iik Syakhabyatin, “Sejarah Wakaf di Indonesia, Sejarah Wakaf di Indonesia”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, 2017

harta benda miliknya yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat. Wakif yang dimaksud ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif menyerahkan hartanya untuk dikelola nazhir, yang mana nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²³

Wakaf berbeda dengan hibah, hadiah, maupun sedekah, mengingat pelaksanaan wakaf haruslah memenuhi unsur-unsur wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia, yaitu:²⁴

- a. Ada wakif.
- b. Ada nazhir.
- c. Ada harta benda wakaf.
- d. Ada ikrar wakaf.
- e. Ada peruntukan harta benda wakaf.
- f. Ada jangka waktu wakaf.

Peruntukan harta benda wakaf menurut BWI hanya dapat digunakan untuk:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bantuan dalam bentuk beasiswa.

hal. 3 ²³ Nyata Nugraha, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019),

²⁴ *Ibid.*, hal. 3

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁵

Wakaf selain sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat. Wakaf merupakan salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia dan memelihara hubungan dengan pencipta-Nya.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar wakaf bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Penjelasan pada ayat diatas yaitu dalam melakukan kebajikan setelah ruku' dan sujud (shalat), maka seseorang melakukan shalat dilengkapi dengan berbuat kebajikan dan diantara pelaku kebajikan yaitu dengan wakaf.

Selain itu dalam Al-Qur'an Suah Ali Imron ayat 92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

²⁵ *Ibid.*, hal. 4

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Abu Talhah mengikuti nasehat tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf.

2. Hadits

Dalam HR. Bukhari: “Umar mengatakan kepada nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokoknya) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.”

Dalam hadits tersebut telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut

harus dibiarkan sedemikian rupa meskipun benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi.

3. Ijma'

Imam Syafi'I menyatakan bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaqaddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf yang lainnya. Kesimpulan berdasarkan dalil-dalil diatas bahwa wakaf ialah anjuran yang diperbolehkan oleh Islam.

4. Dasar Hukum Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut UU Wakaf Kuwait Tahun 1996 Pasal 1, wakaf ialah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam Perundang-undangan tersebut. Definisi ini memberikan penjelasan wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisi tersebut disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu.

2. Wakaf dan Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan keadilan sosial maka diperlukan sebuah program sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial dapat membantu pembangunan nasional yang berkelanjutan di suatu negara, terlebih di negara-negara berkembang. Dalam pengaturannya sistem jaminan sosial terdiri dari jaminan

kesehatan, pensiun, dan dana kematian. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional “Jaminan sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya ”

Adanya wakaf dalam Islam selain untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah, juga sebagai ibadah sosial kepada manusia. Wujud wakaf dalam ibadah sosial berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Konsep ini menandakan bahwa Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat, sebelum adanya konsep jaminan dari barat yang dianggap sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan ketimpangan di masyarakat.

Bukhari Muslim menyatakan bahwa asal mula disyariatkan ibadah wakaf dalam Islam ialah pada masa Umar Bin Khatab mendapat sebidang tanah diperkebunan haybar, kemudian Umar meminta pendapat kepada Rasulullah tentang hartanya itu, saat itu Rasul menasehati, apabila Umar suka lebih baik tanah itu diwakafkan saja dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tanah tersebut langsung diwakafkan Umar serta hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi nadzhir (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah sekedarnya.²⁶

²⁶ Abdul Harim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 12-1

Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam Qs. Al-Qashash ayat 77 menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan dan lainnya merupakan fitrah sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut dalam Islam merupakan sebuah keharusan. Ketika seseorang yang hanya berpangku tangan serta tidak berbuat untuk dirinya maka dianggap zhalim dan melanggar perintah Allah SWT.

Al-Misri berpendapat bahwa²⁷ dalam Islam ada beberapa cara kepemilikan terhadap harta yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, diantara perangkat kepemilikan tersebut adalah melalui usaha individu, pembagian atau distribusi lahan tanah milik negara, mengambil upahan, menerima dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf

Pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya serta dilakukan secara produktif tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara pengumpulan (fundraising), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, argobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan (apartemen, gedung, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan),

²⁷ Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA* Vol. 16 No. 1 Juni 2013

sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sudewo²⁸ menyatakan bahwa adanya nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat penting karena memiliki peran dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu bertanggung jawab, menjaga, memelihara, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf, oleh sebab itu nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis. Pengelolaan bukan menjadi suatu hal yang baru dalam Islam. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik.

Konsep pelayanan publik atau tata kelola organisasi yang dirumuskan Al-Ghazali ialah bahwa organisasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level stakeholders serta taat kepada hukum. Bermanfaat atau tidaknya wakaf, berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan.²⁹

4. Manfaat Tanah Wakaf

Harta benda wakaf baik dalam bentuk tanah maupun bangunan dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsi wakaf, yakni sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan, sarana kesehatan dan memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar dan semacamnya. Harta benda yang sudah

²⁸ Nurhidayani et. al. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Universitas Mataram, Vol. 2 No. 2, 2017

²⁹ *Ibid.*,

diwakafkan maka tidak bisa ditarik kembali, dijual, dilarang dijadikan jaminan, dihibahkan, ditukar, diwariskan ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.³⁰

Tanah wakaf dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Apabila tanah wakaf dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, maka hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan disuatu wilayah. Ketika seseorang dalam keadaan tidak mampu atau dapat dikatakan miskin, dengan adanya fasilitas sekolah yang berasal dari tanah wakaf tersebut bisa melanjutkan pendidikan. Salah satu cara pengentasan kemiskinan ini dapat diselesaikan oleh wakaf. Wakaf sebagai sebuah instrument yang dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan mendesak bagi kaum miskin. Wakaf memiliki sifat dasar yakni amal yang berkelanjutan untuk kepentingan umat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sedikit banyak mengarah pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga perlu menguraikan beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Suadyani dan Darsana³¹ penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pendidikan terhadap

³⁰ Kominfo Jatim, "Wakaf Harus Dimanfaatkan Sesuai Tujuan dan Fungsi" dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/wakaf-harusdimanfaatkan-sesuai-tujuan-dan-fungsi> diakses 23 Juli 2021

kemiskinan di Kabupaten Bangli. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangli.

Primandari³² penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan kuadrat terkecil OLS. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Menggunakan data sekunder pada tahun 2001-2017. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Aristina et. al.³³ penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Menggunakan data sekunder pada tahun 1995-2014. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

³¹ Ni Wayan dan Ida Bagus, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangli”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 5 Mei 2018

³² Primandari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 16 No. 1 Juni 2018

³³ Aristina et. al., “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 5 Mei 2017

Hambarsari dan Kunto Inggit³⁴ penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menggunakan data sekunder pada tahun 2004-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Ridzky Giovanni³⁵ penelitian bertujuan menganalisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS pada tahun 2009-2016. Metode penelitian menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

2. Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan

Fariz dan Ady Soejoto³⁶ penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan teknik analisis data panel. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, dengan *cross section* 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan *time series* tahun 2009-2018, menggunakan model *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan

³⁴ Hambarsari dan Kunto Inggit, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1 No. 2 September 2016

³⁵ Ridzky Giovanni, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016", *Economics Development Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018

³⁶ Fariz dan Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *JUPE* Vol. 8 No. 1 Tahun 2020

bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Syabrina et. al.³⁷ penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dalam penelitian Hutabarat³⁸ bertujuan menganalisis pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil perkapita, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

Pradipta dan Dewi³⁹ penelitian bertujuan menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan kuantitatif asosiatif dan teknik analisis berupa analisis data panel dengan *fixed effect* serta data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan secara

³⁷ Syabrina et. al., “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi”, *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021

³⁸ Hutabarat, *Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi FEB Universitas Sumatera Utara, 2018

³⁹ Pradipta dan Dewi, “Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan”, *JUPE* Vol. 8 No. 3 Tahun 2020

parsial tidak terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

Dalam penelitian Utami dan Masjkuri⁴⁰ bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

3. Wakaf Terhadap Kemiskinan

Dalam penelitian Syamsuri et. al.⁴¹ bertujuan menganalisis potensi wakaf di Indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf sangat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Apabila hal ini dimaksimalkan oleh pemerintah atau *stake holder* pemerintahan maka dapat dipastikan Indonesia bisa sejahtera dengan wakaf yang dikumpulkan dan dibagikan secara adil dan merata.

⁴⁰ Utami dan Masjkuri, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Tebruka dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga* Vol 28 No. 2 Juni-November Tahun 2018

⁴¹ Syamsuri et. al, "Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)", *Malia : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No. 1 Desember 2020

Dalam penelitian Agus Triyanta dan Mukmim Zakie⁴² bertujuan menganalisis problematika pengelolaan tanah wakaf berdasarkan konsep klasik dan keterbatasan inovasi pemanfaatannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren.

Solikhul Hadi⁴³ penelitian bertujuan menganalisis pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf ialah potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara professional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh pemerintah.

⁴² Agus Triyanta dan Mukmim Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatan di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21 No. 4 Oktober 2014

⁴³ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf, STAIN Kudus*, Vol. 4 No. 2 Desember 2017

Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati⁴⁴ penelitian bertujuan menganalisis peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. metode penelitian menggunakan *literature review* dengan hasil peneltiian menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang menggunakan asas filantropi disamping zakat, infak, shodaqoh. Wakaf menjadi salah satu pilihan alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi misalnya kemiskinan.

Dalam penelitian Munardi et. al.⁴⁵ bertujuan menganalisis pengaruh wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Mukim Matang Payang. Menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuisisioner kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode peneltiian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan bantuan EVIEWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki hubungan yang kuat terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak wakaf produktif yang diberikan kepada masyarakat maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mukim Matang Payang.

F. Kerangka Konseptual

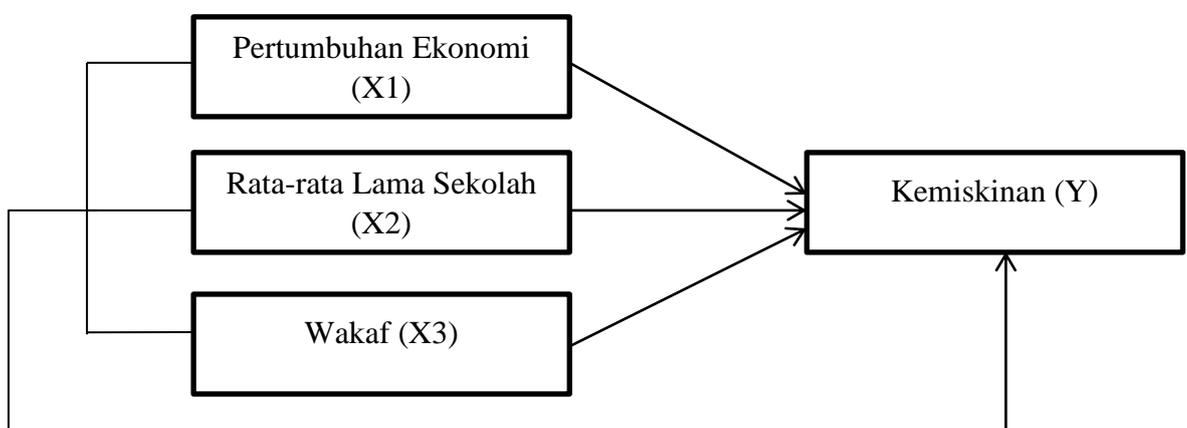
Kerangka konseptual dalam pemikiran ini adalah ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan wakaf mempengaruhi

⁴⁴ Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, “Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Vol 22 No. 2 Tahun 2020

⁴⁵ Munardi et. al., “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol. 2 No. 1 Tahun 2020

kemiskinan. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen dan bersama-sama, dengan variabel dependen ialah kemiskinan. Tingkat signifikan setiap variabel independen diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab kemiskinan. Berikut ialah gambaran dari skema kerangka konseptual.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan sementara atau dugaan paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Hipotesis menjawab rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dikemukakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis 1

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan.

H_a = Terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan.

Hipotesis 2

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara variabel rata-rata lama sekolah terhadap variabel kemiskinan.

H_a = Terdapat pengaruh antara variabel rata-rata lama sekolah terhadap variabel kemiskinan.

Hipotesis 3

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara variabel jumlah tanah wakaf terhadap variabel kemiskinan.

H_a = Terdapat pengaruh antara variabel jumlah tanah wakaf terhadap variabel kemiskinan.

Hipotesis 4

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan jumlah tanah wakaf terhadap variabel kemiskinan.

H_a = Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan jumlah tanah wakaf terhadap variabel kemiskinan.